

**PRODUK BIR NON ALKOHOL TANPA LABEL HALAL DALAM
PERSPEKTIF MUI PROVINSI LAMPUNG**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Muamalah**

Oleh :

Yulia Dinda Pertiwi

1421030302

Muamalah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

**PRODUK BIR NON ALKOHOL TANPA LABEL HALAL DALAM
PERSPEKTIF MUI PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Muamalah**

Disusun Oleh :

Yulia Dinda Pertiwi

1421030302

Jurusan : Muamalah

Pembimbing I : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H

Pembimbing II : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1440 H / 2018 M

ABSTRAK

PRODUK BIR NON ALKOHOL TANPA LABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF MUI PROVINSI LAMPUNG

OLEH

Yulia Dinda Pertiwi

Telah terdapat minuman bir non alkohol atau 0% alkohol guinness, bintang yang sudah banyak ditemukan dan diperjual-belikan di minimarket dan supermarket. Minuman tersebut dengan kadar alkohol 0% artinya perusahaan telah menciptakan minuman tersebut tanpa menggunakan alkohol sehingga aman untuk konsumen meminumnya. Tetapi disisi lain minuman ini belum ada label halal nya yang belum dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sangat penting suatu produk harus mendaftarkan untuk diberikan adanya label halal untuk membuat para konsumen aman untuk meminumnya. Disisi lain, para konsumen masih jarang yang memperhatikan produk-produk makanan dan minuman yang belum ada label halal tersebut. Padahal banyak di Indonesia masyarakatnya beragama Islam yang sangat memperhatikan halal dan haramnya suatu makanan dan minuman. Sehingga membuat bingung produk minuman bir tersebut halal atau haram padahal kadar alkohol yang tertera di kemasan 0% yang sangat perlu diperhatikan pada suatu produk minuman.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat MUI Provinsi Lampung tentang Produk Bir Non Alkohol yang belum disertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat MUI Provinsi Lampung tentang Produk Bir Non Alkohol yang belum disertifikasi halal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu interview dan dokumentasi. Sedangkan metode analisi data yang digunakan adalah metode kualitatif yang menggunakan pola berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa produk bir non alkohol yang belum bersertifikat halal itu haram hukumnya, karena proses pembuatan bir non alkohol sama saja seperti pembuatan bir biasa hanya saja diakhir proses alkohol tersebut dihilangkan. Dan belum ada produk bir yang sudah mendapatkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia karena MUI menyatakan bahwasannya Sertifikat Halal tidak akan dikeluarkan bagi produk makanan-minuman yang memiliki nama dan berkontaminasi pada sesuatu yang haram, walaupun kenyataannya bahan yang digunakan produk tersebut seluruhnya halal. Sertifikat Halal hanya dikeluarkan apabila nama produknya telah diganti. Disamping itu lebih banyak mudharatnya seperti: radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Efek jangka pendeknya seperti mengantuk, pusing, ketidakmampuan untuk berfikir jernih. Dalam segi sosial kebiasaan meminum-minuman ini banyak menimbulkan masalah diantaranya dapat memutuskan orang untuk mengerjakan sholat, menimbulkan permusuhan.



KEMENTRIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol Hi Endro Suratmin Sukarame andar Lampung Telp.(0721) 703278

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Yulia Dinda Pertiwi**

NPM : **1421030302**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Mu'amalah**

Judul Skripsi : **PRODUK BIR NON ALKOHOL TANPA LABEL
HALAL DALAM PERSPEKTIF MUI PROVINSI
LAMPUNG**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197501292000031001

Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah

Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag, M.H.
NIP. 197208262003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PRODUK BIR NON ALKOHOL TANPA LABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF MUI PROVINSI LAMPUNG NPM.**

1421030302 Telah di ujikan dalam siding munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN

Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum'at, 07 September 2018

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Marwin, S .H., M.H. (.....)

Sekretaris : Arif Fikri, SHI.,M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A. (.....)

Penguji II : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag
NIP: 197009011997031002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al Maidah : 90)¹



Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1995), hlm.156

PERSEMBAHAN

Dalam penulisan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu yang telah memberikan pendidikan yang penuh cinta dan kasih sayang, terima kasih atas pelajaran tentang kehidupan yang tidak akan pernah dapat ku balas bagaimanapun jua.
2. Untuk kakak-kakakku, Hengky, Heni Andriyani, dan Sari Tria Susiayanti serta semua keponakanku yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi, semangat, dan kasih sayang yang tiada henti kepadaku dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Sepupuku Dwi Novita Putri yang selalu ada dan menemani kemanapun kapanpun sejak lahir selalu bersama.
4. “ezemelekeheze” : Umi Nur, Siti Rochmawati, Mutiara Awaliyah, Nugraheni Fajar, dan Desi terima kasih atas persahabatan, doa serta dukungan moril kepadaku.
5. “*My Future*” terima kasih atas waktunya, kasih sayang, perhatian, motivasi dan semangat yang telah diberikan dengan tulus.
6. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan untuk berfikir dan bertindak secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Yulia Dinda Pertiwi. Dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 Juli 1996 sebagai anak keempat dari empat bersaudara dari Bapak Dwi Jatmiko dan Ibu Suratmi.

Pendidikan dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK Dewi Sartika) tahun 2002, Sekolah Dasar (SD Kartika II – 5 Bandar Lampung) tahun 2008, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SMP Negeri 29 Bandar Lampung) tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 5 Bandar Lampung) tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Muamalah di Fakultas Syari'ah dan Hukum.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Produk Bir Non Alkohol Tanpa Label Halal dalam Perspektif MUI Provinsi Lampung” sebagai syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum .

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya ditunjukan kepada :

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Ibu Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
3. Bapak dan Ibu Dosen, para Staf Karyawan Fakultas Syari’ah
4. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Pusat yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

5. Bapak Suryani S.Sos., M.M. selaku Ketua V MUI Provinsi Lampung, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data-data dalam penyusunan skripsi ini.

Terima kasih atas jasa dan bantuan yang telah diberikan. Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT

Bandar Lampung, 23 Mei 2018

Yulia Dinda Pertiwi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
F. Metode Penelitian.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Makanan dan Minuman Halal	
1. Pengertian dan Dasar Halal Makanan dan Minuman	12
2. Syarat dan Kriteria Makanan dan Minuman Halal	21
3. Penggunaan Alkohol dalam Produk Makanan dan Minuman	23
4. Pengertian Bir dan Prinsip Mudharat dalam Konsumsi Bir.....	26
B. Penetapan Produk Halal	
1. Pengertian Produk Halal	28
2. Lembaga yang berwenang dalam penetapan produk halal di Indonesia	37
3. Sistem dan Prosedur Penetapan Produk Halal	41

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia	
--	--

(MUI) Provinsi Lampung.....	49
B. Visi, Misi, Tujuan dan kewenangan (MUI) Provinsi Lampung.....	54
C. Struktur Organisasi (MUI) Provinsi Lampung	56
D. Produk Bir Non Alkohol Menurut MUI Provinsi Lampung.....	62
E. Pendapat MUI tentang Produk Bir Non Alkohol yang belum Disertifikasi Halal	63

BAB IV ANALISA DATA

A. Analisis Pendapat MUI Provinsi Lampung tentang Produk Bir Non Alkohol.....	66
B. Analisis Pendapat MUI Provinsi Lampung tentang Produk Bir Non Alkohol yang belum Disertifikasi Halal	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami dan menghindari penafsiran yang berbeda, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul “Produk Bir Non Alkohol Tanpa Label Halal dalam Perspektif MUI Provinsi Lampung”

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Produk Bir

Produk Bir adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Bisa juga dapat diartikan yaitu benda yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi.¹Sedangkan bir adalah minuman yang mengandung alkohol yang dibuat dengan peragian lambat.²Jadi produk bir adalah barang atau jasa yang isi nya mengandung alkohol.

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 156

2. Non Alkohol

Alkohol adalah cairan tidak bernyawa yang mudah menguap, mudah terbakar, di pakai di industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan, yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras.³Jadi non alkohol adalah minuman yang tidak mengandung cairan yang memabukkan.

3. Label Halal

Label Halal adalah pencantuman tulisan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.⁴

4. MUI (Majelis Ulama Indonesia)

MUI adalah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah produk bir non alkohol tanpa label halal dalam perspektif MUI Provinsi Lampung. Dalam permasalahan tersebut ingin mengkaji lebih lanjut mengenai minuman bir non alkohol yang akan diteliti menurut pendapat MUI Provinsi Lampung.

³*Ibid*, hlm. 32

⁴Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003) hlm. 2

⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia diakses pada tanggal 27 September 2018, pukul 09.25 WIB

B. Alasan Memilih Judul

Alasan dalam memilih judul sebagai bahan untuk penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

- a. Allah SWT memerintahkan manusia untuk memperhatikan makanan dan juga minuman yang halal.
- b. Terdapat produk minuman bir non alkohol tetapi tidak ada label halal, sedangkan minuman-minuman tersebut sudah banyak dijual di supermarket dan di mall-mall besar sehingga telah banyak pula konsumen membeli minuman tersebut dikarenakan mereka berfikir minuman tersebut tanpa alkohol, tanpa melihat ada atau tidaknya label halal pada kemasan minuman tersebut. Sehingga penelitian ini dianggap perlu pembahasan yang lebih mendalam dikarenakan sangat penting mengetahui apakah minuman tersebut halal atau haram.

2. Alasan subjektif

Permasalahan tersebut merupakan salah satu kajian bidang muamalah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang dirasa perlu untuk diteliti.

C. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman sudah banyak bermacam-macam minuman yang dapat dikonsumsi manusia. Minuman sangat penting untuk kesehatan, karena setiap manusia membutuhkan cairan. Sudah semakin banyak inovasi minuman yang

telah diciptakan oleh perusahaan-perusahaan besar dan dijual dipasaran, dan supermarket besar yang berada di Indonesia.

Secara sederhana minuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu minuman beralkohol dan minuman non alkohol. Minuman alkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Adapun faktor orang minum-minuman alkohol ini karena adanya masalah kehidupan pada diri orang tersebut dan melampiaskan masalah tersebut dengan minum alkohol tersebut. Padahal meminum-minuman alkohol ini tidak menyelesaikan masalah, dalam Islam meminum-minuman alkohol sama saja meminum khamr dan haram hukumnya meminum-minuman alkohol sebab minuman tersebut memabukkan.

Setelah perkembangan semakin maju dikarenakan minuman alkohol dapat membahayakan konsumen yang meminumnya, maka telah diciptakan minuman bir non alkohol yaitu minuman tanpa mengandung etanol sehingga tidak memberikan dampak bagi konsumen yang meminumnya. Minuman ini sudah banyak diperjual-belikan di supermarket dan mall-mall besar di Indonesia, salah satunya di Bandar Lampung banyak ditemukan minuman non alkohol contoh nya: aqua botol dan susu, minuman yang diseduh seperti teh dan kopi, minuman bersoda seperti Fanta, coca-cola, sprite, dan minuman bir.

Telah terdapat bir non alkohol atau 0% alkohol seperti guinness, bintang sudah dapat ditemukan minuman tersebut dengan kadar alkohol 0% artinya perusahaan telah menciptakan minuman tersebut tanpa menggunakan alkohol, sehingga aman untuk konsumen dapat meminumnya. Minuman ini telah diperjual-belikan dengan

bebas disupermarket dan mall-mall besar. Tapi ketika minuman tersebut sudah aman diminum karena kadar alkohol nya 0% ada lagi masalah yang harus didalami karena tidak ada label halalnya dalam kemasan kaleng minuman tersebut.

Para konsumen sangat tidak memperhatikan adanya label halal atau tidak padahal sangat berpengaruh adanya label halal tersebut. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan. Diatur dalam pasal 10 ayat 1 yang isinya setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut “halal” bagi umat manusia, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.⁶

Masih sedikit perusahaan yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Bahkan di Indonesia sudah banyak makanan dan minuman yang telah diimport dari luar negeri dan diperjual-belikan di wilayah Indonesia. Produk bir non alkohol ini sangat disayangkan karena tidak adanya label halal dalam kaleng kemasan sehingga masih membuat bingung apakah minuman ini halal atau haram padahal minuman tersebut sudah memiliki kadar non alkohol.

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 69 tahun 1999, *Label dan Iklan Pangan*.

Berdasarkan uraian dan pemaparan tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian agar menambah pemahaman kita mengenai Produk Bir Non Alkohol Tanpa Label Halal dalam Perspektif MUI Provinsi Lampung.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat MUI Provinsi Lampung tentang Produk Bir Non Alkohol?
2. Bagaimana pendapat MUI Provinsi Lampung tentang Produk Bir Non Alkohol yang belum disertifikasi halal?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pendapat MUI Provinsi Lampung tentang Produk Bir Non Alkohol
 - b. Untuk mengetahui pendapat MUI Provinsi Lampung tentang Produk Bir Non Alkohol yang belum disertifikasi halal
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal dan memberikan pemahaman mengenai Produk Bir Non Alkohol Tanpa Label Halal dalam Perspektif MUI Provinsi Lampung.

- b. Secara praktis diharapkan sebagai bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum sehingga dapat diambil langsung manfaatnya, serta sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam realitas kehidupan yang sebenarnya.⁷ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kajian halal menurut MUI Provinsi Lampung.

Dilihat dari sifatnya, penelitian bersifat deskriptif yaitu metode dan meneliti suatu objek yang bertujuan membuat gambaran, atau melukis secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.⁸ Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana kajian halal dalam bir non alkohol.

2. Jenis Data

a. Data Primer

⁷ Dulet Unaradjan, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: PT Grapindo, 2000) hlm.198

⁸ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005) hlm.58

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber pertama dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu Bapak H. Suryani M. Nur, S.Sos., M.M. Ketua V MUI Provinsi Lampung karena staff MUI telah menunjuk beliau dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diambil dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat dalam kepustakaan.⁹ Data sekunder yang diperoleh dari peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hlm.27

Dalam pengumpulan data dari lapangan, maka metode-metode yang diuraikan adalah :

a. Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹⁰

b. Interview

Yaitu tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang dapat melihat muka yang lainnya dan mendengarkan sendiri suaranya.¹¹ Pendapat lain menyatakan bahwa metode interview adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.¹²

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek peneliti namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan

¹⁰ *Ibid.* hlm.64

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995) hlm.192

¹² Lexi. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001)

notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.¹³

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Editing

Yaitu pengecekan dan pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.¹⁴ Data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara yang sudah dianggap lengkap dan jelas lalu data tersebut dijabarkan dengan bahasa yang mudah dipahami.

b. Sistematizing

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁵ Dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis, data yang diedit dan diberi tanda menurut klarifikasi dan urutan masalah.

¹³Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung 2014) hlm. 115

¹⁴*Ibid.*, h.122

¹⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 126

5. Metode Analisi Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu minuman bir non alkohol menurut pendapat MUI Provinsi Lampung yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif, artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati, diarahkan pada latar belakang individu secara utuh.

Metode berfikir yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu menelaah suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁶ Sesuatu yang umum dari penelitian ini adalah produk minuman bir non alkohol yang sudah banyak diperjual-belikan di mall atau supermarket tetapi tanpa label halal, namun bagaimanakah menurut pendapat MUI Provinsi Lampung tentang produk minuman tersebut.

¹⁶Lexy. J Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya) hlm. 8

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Makanan dan Minuman Halal

1. Pengertian dan Dasar Halal Makanan dan Minuman

Dari segi etimologi makan berarti memasukan sesuatu melalui mulut.¹⁷ Sedangkan makanan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia baik berupa makanan pokok maupun makanan lainnya.¹⁸ Kata makan dalam bahasa Arab disebut “at ta’am” atau “al atimah” yang artinya makan makanan.¹⁹ Dalam ensiklopedi hukum Islam makanan adalah segala sesuatu yang boleh dimakan manusia atau sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar.²⁰

Secara etimologi kata halal berasal dari bahasa Arab yang artinya membolehkan, memecahkan, membebaskan. Secara terminologi kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm. 862

¹⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, (Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Umat, 2007) hlm. 491

¹⁹ Adib Bisri dan Munawwir AF, *Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999) hlm. 201

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, cet-1) hlm. 1071

dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.²¹

Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dan didapatkan dengan cara yang diperbolehkan, dibeli dengan uang mubah tanpa proses yang merugikan orang lain.

Menurut Departemen Agama makanan halal adalah makanan yang baik dan diperbolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.²²

Minum, secara etimologi adalah meneguk barang cair dengan mulut, sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum. Jadi minuman halal adalah sesuatu yang boleh diminum dan diperbolehkan menurut ajaran agama Islam.

Hukum dasar semua makanan dan minum adalah mubah dan halal, kecuali yang diharamkan dan membahayakan bagi kesehatan, anggota tubuh manusia dan agamanya. Dengan kata lain bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram untuk dikonsumsi. Allah telah memberikan anugerah tak terhingga kepada manusia dengan menjadikan semua yang

²¹ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003) hlm. 3

²² *Ibid.*

diciptakannya dimuka bumi ini boleh digunakan kecuali yang diharamkannya.

Sebenarnya jangkauan halal dalam makanan dan minuman sangatlah luas karena bumi ini diciptakan oleh Allah SWT dengan segala sesuatunya termasuk hewan, tumbuhan dan air yang merupakan sumber makanan dan minuman bagi manusia.

Dasar Halal Makanan dan Minuman

a. Al-Qur'an

1. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.* (QS. Al-Baqarah: 168)²³

Dalam ayat diatas Allah mengajak kepada seluruh manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quraish Shihab memaparkan makanan yang halal adalah makanan yang tidak haram, artinya ketika dimakan tidak menimbulkan larangan oleh agama. Jika menimbulkan larangan dari agama contohnya seperti daging babi, darah dan bangai maka itu adalah makanan

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989) hlm. 42

yang diharamkan. Kemudian dalam hal ini diperintahkan juga bahwa janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sebab setan akan menjerumuskan manusia sedikit demi sedikit.²⁴

2. Al-Baqarah ayat : 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.* (QS. Al-Baqarah: 172)²⁵

Dalam ayat diatas Allah menyuruh manusia agar makan dan minum yang baik-baik dan setelah itu bersyukurlah sebagai bentuk penghambaaan kita kepada-Nya. Quraish Shihab menjelaskan bahwa makanan-makanan yang diharamkan tersebut dikemukakan dalam konteks mencela masyarakat Jahiliyah, baik di Mekkah maupun di Madinah yang memakannya. Mereka misalnya membolehkan memakan binatang yang mati tanpa disembelih dengan alasan bahwa yang disembelih atau dicabut nyawanya oleh manusia halal, maka mengapa haram yang dicabut sendiri nyawanya oleh Allah? Penjelasan tentang keburukan ini dilanjutkan dengan uraian ulang tentang mereka yang menyembunyikan kebenaran, baik menyangkut kebenaran

²⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm. 379

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op,Cit*, hlm. 42

Nabi Muhammad, urusan kiblat, haji, dan umroh, maupun menyembunyikan tuntutan Allah menyangkut makanan. Orang-orang Yahudi misalnya, menghalalkan hasil suap, orang-orang Nasrani membenarkan sedikit minuman keras, kendati dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit dari mereka yang meminumnya dengan banyak.²⁶

3. Al-Maidah ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya : *dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*²⁷

Dalam ayat diatas, Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakannya kepada mereka, “halal” disini mengandung pengertian, halal bendanya dan halal cara memperolehnya, sedangkan “baik” adalah dari segi kemanfaatannya yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein, dan sebagainya. Makan tidak baik, selain tidak mengandung gizi, juga dikonsumsi akan merusak kesehatan. Prinsip halal dan baik itu hendaklah senantiasa menjadi perhatian dalam menentukan makanan dan minuman yang akan dimakan untuk diri sendiri dan untuk keluarga,

²⁶ Ibid, hlm. 386

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op,Cit*, hlm 176

karena makanan dan minuman itu tidak hanya berpengaruh terhadap jasmani melainkan juga rohani.²⁸

4. Al Maaidah ayat 90-91

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).²⁹

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan larangan untuk mukmin meminum khamar dan melakukan perjudian. Selanjutnya, larangan ini melalui tiga tahapan, yaitu tahap pertama menjelaskan kerugian lebih besar dari manfaat (Al-Baqarah: 219), tahap kedua melarang shalat orang mabuk (An-Nisa: 43), dan tahap ketiga, ayat ini (Al-Maaidah: 90) yang menyatakan minum khamar termasuk perbuatan syaitan dan harus di jauhi.³⁰

²⁸ Hamka, *Tafsir AlAzhar*, (Jakarta: PT.Pustaka Panjimas, 1984) hlm. 304-305

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op,Cit*, hlm 176-177

³⁰ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*,(Jakarta: Darus Sunnah, 2014) hlm.705-506

Sayyid Quthb keharaman minum khamar bukanlah sesuatu yang instan, tetapi melalui empat tahapan dan tiga tahun setelah perang uhud, yaitu:

- a. Tahap pertama, mengetuk perasaan mereka bahwa tindakan membuat minuman yang memabukkan (yakni khamar) sebagai kebalikan dari rejeki yang baik (An-Nahl: 67)
- b. Tahap kedua, menggerakkan rasa keagamaan melalui rasionalisasi syariat di dalam jiwa kaum muslimin (Al Baqarah: 219)
- c. Tahap ketiga, mematahkan tradisi minum-minuman keras dan membuka jurang pemisah antara minuman keras dengan kewajiban mengerjakan shalat (An-nisa: 43)
- d. Tahap keempat, merupakan tahap terakhir dan pasti, sedang jiwa sudah siap secara sempurna. Sehingga, dalam tahap ini yang ada hanyalah larangan semata-mata yang direspons dengan kepatuhan dan ketundukkan serta merta.³¹

5. An Nahl ayat 69:

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا ۖ تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ
 أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Artinya : kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat

³¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilalill Qur'an*, Jilid 3, hlm. 322-325

yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.³²

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memberi lebah untuk memakan berbagai jenis buah-buahan dan untuk menempuh jalan-jalan yang memudahkan Allah baginya sesuai dengan kemauannya, baik di udara, darat, lembah, maupun pegunungan, lalu ia kembali ke sarangnya tanpa tersesat. Ia membuat malam dari apa yang ada pada sayapnya, mulutnya mengeluarkan madu, dan duburnya mengeluarkan telur yang menjadi anak. Kemudian ia pergi dipagi hari ke tempat-tempat mencari makan.

Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Didalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Madunya itu berwarna putih, kuning, merah, dan warna lainnya sesuai dengan warna makanannya. Artinya madu itu cocok bagi setiap orang, misalnya untuk mengobati dingin, karena madu itu panas, karena penyakit diobati dengan antinya.³³

b. Hadist Rasulullah SAW

Hadist-hadist Nabi yang berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ تَقَيَّ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضِهِ (رواه مسلم)

Artinya : “halal dan haram adalah perkara yang jelas, dan diantara keduanya terdapat perkara yang syubhat (sesuatu yang meragukan, samar-samar, sesuatu yang tidak jelas

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Op, Cit*, hlm 412

³³ Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2012) hlm. 1042-1043

apakah halal atau haram), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya".(HR. Muslim)³⁴

c. Kaidah Fikih

Hukum makanan dan minuman adalah halal hingga ada dalil yang mengharamkannya. Tidak diperbolehkan mengharamkan makanan dan minuman kecuali diharamkan oleh Allah yang melalui lisan Rasul-Nya. Sebab-sebab dan alasan pengharaman makanan dan minuman yang disebutkan para fuqaha antara lain:³⁵

1. Membawa madharat pada badan dan akal, seperti racun.
2. Memabukkan dan merusak akal, seperti minuman khamar serta narkoba (ganja, opium, dan sejenisnya).
3. Makanan najis atau mengandung najis yang tidak bisa dihilangkan najisnya, seperti air kencing dan susu hewan yang haram dimakan.
4. Menjijikan menurut pandangan orang yang lurus fitrahnya, seperti kotoran hewan, air kencing, kutu, hama.
5. Tidak diberi izin secara syar'i karena makanan itu milik orang lain, seperti hasil rampasan, pencurian, diperoleh dengan judi, atau hasil pelacuran.

³⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 1, hlm.448

³⁵ Yazid Abu Fida', *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, (Solo: Pustaka Arafah, 2004) hlm.2

2. Syarat dan Kriteria Makanan dan Minuman Halal

Makanan secara umum ada tiga kategori yang dikonsumsi yaitu, nabati, hewani dan hasil olahan. Makanan yang berbahan nabati secara keseluruhan halal, dan karena itu boleh dikonsumsi “kecuali” yang mengandung racun atau membahayakan kesehatan fisik dan atau psikis manusia.³⁶

Makanan hewani terbagi menjadi dua kelompok yaitu yang berasal dari laut dan berasal dari darat. Hewan laut yang hidup di air asin/laut dan air tawar/sungai dihalalkan, bahkan ikan yang mati dengan sendirinya pun tetap dibolehkan untuk dikonsumsi.³⁷

Adapun hewan yang hidup di darat, maka Al-Qur'an menghalalkan secara eksplisit *al-an'am* (unta, sapi, dan kambing), termasuk didalamnya ada jenis unggas, dan mengharamkan babi secara tegas.³⁸

Makanan olahan adalah makanan dan minuman yang diolah berasal dari bahan baku dengan proses teknologi yang sesuai dan atau ditambah dengan bahan pengawet dan atau bahan penolong agar tahan untuk disimpan.³⁹

³⁶ Fadhlán Mudhafier dan Wibisono, *Makanan Halal (Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha)*, (Jakarta: Zakia Press, 2004) hlm.45

³⁷ Ahsin W. Al-Hafdz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2007) hlm.182

³⁸ *Ibid*, hlm.182

³⁹ *Ibid*, hlm.184

Syarat makanan dan minuman yang dihalalkan antara lain:⁴⁰

- a. Tidak mengandung bagian dari binatang atau sesuatu yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam. Adapun yang termasuk najis adalah:
 - 1) Bangkai hewan darat yang berdarah, bagian dari tubuh hewan yang dipotong saat hidup, kecuali manusia;
 - 2) Darah;
 - 3) Babi, anjing dan keturunannya;
 - 4) Arak dan sejenisnya yang memabukkan, sedikit atau banyak;
 - 5) Nanah;
 - 6) Semua yang keluar dari *dubur* dan *qubul* kecuali *mani*.
- c. Tidak mengandung bahan penolong atau bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran Islam.
- d. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau bersekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan atau benda yang menghukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam.

Yang termasuk makanan dan minuman halal adalah:

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 187-188

1. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
2. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam.
3. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan

3. Penggunaan Alkohol dalam Produk Makanan dan Minuman

Dari sudut bahasa alkohol berasal dari bahasa Arab “Alghol” yang berarti sesuatu yang memabukkan atau merusak akal. Alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidrosil (-OH) yang terikat pada atom karbon yang ia sendiri terikat pada atom hydrogen dan atau atom lain.⁴¹

Penggunaan alkohol sering digunakan sebagai pelarut adalah jenis methanol, etanol, dan isopropanol. Methanol digunakan sebagai pelarut dalam cat, bahan anti beku dan senyawa kimia lainnya. Sedangkan etanol banyak digunakan sebagai pelarut, antiseptik, campuran obat batuk, anggur obat, bahan minuman keras yang mengandung alkohol.⁴²

⁴¹ John Willey dan Soon, *Introduction To Organic Chemistry*, (t.p: t.p, 2011) hlm.487

⁴² Koes Irianto, *Pencegahan dan Penanggulangan Keracunan Bahan Kimia Berbahaya*, (Bandung: Yrama Widya, 2013) hlm.98

Makanan dan minuman haram yang dapat meragukan memiliki dampak negatif bagi masyarakat muslim. Salah satu yang diharamkan dalam Islam adalah khamar. Menurut Yusuf Qardhawi khamar adalah bahan yang mengandung alkohol dan memabukkan.⁴³ Mayoritas ulama berpendapat bahwa khamar menurut mereka adalah semua minuman yang mengandung unsur memabukkan, sekalipun tidak terbuat dari perasan anggur.⁴⁴

Islam tidak memperkenankan seorang muslim untuk meminumnya walaupun hanya sedikit, dan tidak memperkenankannya untuk diperjual-belikan atau membuatnya, tidak boleh memasukannya ke dalam toko atau rumahnya, tidak boleh mendatangkannya di acara kegembiraan, tidak boleh menghidangkan kepada tamu non muslim sekalipun, dan tidak boleh mencampurkannya ke dalam makanan dan minumannya.⁴⁵ Larangan mengkonsumsi khamar memiliki tujuan tertentu. Tujuan dari hukum Islam adalah untuk memelihara agama (menjaga shalatnya), memelihara jiwa (tidak ada kekerasan, pembunuhan), memelihara akal (melindungi syaraf otak dan akal), memelihara harta, memelihara keturunan.

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal-haram fil-Islam* terj. Abu Sa'id al-Falahi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2008) hlm. 75

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an Jilid 2*, (Tangerang: Lentera Hati, 2006) hlm.172

⁴⁵ Yusuf Qardhawi. *Op.Cit*, hlm. 77

Ulama sepakat tentang haramnya khamar, sedikit atau banyak. Tetapi mereka berbeda pendapat menyangkut minuman yang terbuat dari anggur. Imam Malik dan Syafi'i mengharamkannya, selama berpotensi memabukkan baik diminum sedikit maupun banyak.⁴⁶

Khamar atau minuman yang mengandung alkohol sehingga berbahaya bagi tubuh manusia karena dapat merusak akal, karena itu khamar harus ditinggalkan. Minuman keras menyebabkan sistem kerja organ otak dalam diri manusia menurun sebagaimana yang terjadi bila menggunakan obat bius.⁴⁷ Akan tetapi, Syaikhani mengatakan bahwa alkohol itu suci. Karena Allah tidak pernah mengharamkan alkohol dalam Al-Qur'an seperti bangkai, daging babi, dan darah. Hal inilah yang terkuat (*rajih*) karena alkohol bukan bangkai, bukan daging babi, dan juga bukan darah. Alkohol itu bukanlah khamar yang sebenarnya dan tidak ada juga suatu *nas* yang mengatakan alkohol itu najis.⁴⁸

Jika ditinjau dari segi zatnya, alkohol terbagi menjadi dua yaitu alkohol sintetis (alkohol yang terbuat dari pabrik) dan alkohol dari hasil fermentasi. Alkohol fermentasi inilah yang disebut khamar, yang secara hukum haram dan najis. Sedangkan alkohol sintetis dinyatakan suci

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Op.Cit*, hlm 172-173

⁴⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Percetakan Angkasa, 2005) hlm. 74

⁴⁸ Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Al-Ath'imah Wadz Dzabaa-ih* terj. Sofyan Hukum *Makanan dan Sembelihan Dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1997) hlm.148

meskipun haram dikonsumsi karena memiliki sifat dan karakter yang sama dengan alkohol fermentasi. Berdasarkan kadar fermentasi alkohol yang dibenarkan dapat ditentukan berdasarkan dua tahap, yaitu proses menghasilkan arak atau *khamar* dan proses menghasilkan cuka atau *khal*. Bagaimanapun juga proses yang menghasilkan khamar adalah haram karena minuman tersebut memabukkan apabila kadar alkoholnya melebihi tahapan yang dibenarkan. Makanan dan minuman yang mengandung etanol dapat berpotensi memabukkan dan sudah jelas haram hukumnya.

4. Pengertian Bir dan Prinsip Mudharat dalam Konsumsi Bir

Bir adalah minuman yang mengandung alkohol yang dibuat dengan peragian lambat.⁴⁹ Bir diproduksi melalui proses fermentasi bahan dan tidak melalui proses penyulingan setelah fermentasi. Pembuatan bir merupakan makanan salah satu teknik pengawetan makanan. Bir mengandung senyawa etanol dan antibakteri. Makanan dan minuman yang mengandung alkoholnya tinggi maka jelas kedudukan hukumnya haram karena termasuk kedalam kategori khamr. Makanan hasil peragian yang mengandung alkohol seperti pembuatan tape, maka hukumnya didasarkan pada penelitian. Jika membiarkan makanan hasil peragian hingga beberapa hari sehingga alkoholnya meningkat dan memabukkan, maka hukumnya

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.156

haram. Alkohol dalam minuman keras hukumnya haram untuk dikonsumsi karena rata-rata kadarnya di atas 1%. Proses pembuatan bir atau tape tidak jauh berbeda dengan pembuatan tape ketan, keduanya memanfaatkan proses fermentasi yang mengubah gula menjadi alkohol.⁵⁰

Proses pembuatan bir disebut *brewing*. Karena bahan yang digunakan untuk membuat bir antara satu tempat dengan tempat lainnya, maka karakteristik bir seperti rasa dan warna yang sangat berbeda baik jenis dan klarifikasinya.

Tahap proses pembuatan bir yaitu:

a. Malting dan Mashing

Proses konversi polisakarida (pati) menjadi oligosakarida (maltose dan dekstrin) dengan menggunakan enzim. Proses ini terjadi di malthouse (rumah kecambah). Bertujuan untuk melarutkan sebanyak mungkin zat-zat dari malt dan sumber zat pati lain dengan cara hidrolisa dari zat pati dan polisakarida.

b. Fermentasi oleh yeast/khamir

Khamir sangat menentukan kualitas bir. Khamir memberikan aroma dan sejumlah oligosakarida yang tidak terfermentasikan.

c. Penghilangan yeast dan senyawa kontaminan lainnya.

⁵⁰ Kiblat, *Hukum Alkohol dalam Makanan dan Minuman*.

<https://m.kiblat.net/2014/03/27/hukum-alkohol-dalam-makanan-dan-minuman/> diakses pada tanggal 30 Mei 2018

Mudharat adalah sesuatu yang tidak menguntungkan, dalam produk bir ini prinsip mudharat dalam konsumsi bir akan mengalami gejala mulu terasa kering, pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang. Hilangnya akal sehat, mungkin pula akan timbul rasa mual.

Dalam segi kesehatan kebiasaan meminum-minuman keras akan berdampak negatif peminum biasanya menampilkan ciri fisik yang berbeda dari orang biasanya, perut bagian bawah (sisikan) mereka terlihat buncit sedangkan tubuh mereka seniri kurus dan juga akan berdampak pada tubuh yang akan terancam masalah dari dalam tubuh seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Efek jangka pendeknya seperti mengantuk, pusing, ketidakmampuan untuk berfikir jernih.

Dalam segi sosial kebiasaan meminum-minuman ini banyak menimbulkan masalah diantaranya dapat memutuskan orang untuk mengerjakan sholat, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Sedangkan dalam jiwa, yaitu dapat menghalang-halangi untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agama diantaranya sholat.⁵¹

B. Penetapan Produk Halal

1. Pengertian Produk Halal

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan atau yang memenuhi syariat Islam. Produk itu tidak mengandung babi, serta

⁵¹ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, (Surabaya, Putra Pelajar, 2002), hlm. 123

tidak menggunakan alkohol sebagai bahan yang ditambahkan dalam makanan dan minuman.

Produk halal ini harus dengan adanya sertifikasi halal dari fatwa MUI untuk menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Tujuan pencantuman sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman untuk melindungi konsumen dan hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sehingga konsumen muslim tidak akan ragu untuk membeli produk makanan dan minuman yang diperdagangkan.

Produk halal yang memenuhi syarat sesuai syariat Islam antara lain:

1. Tidak mengandung babi (termasuk bahan yang berasal dari babi), tidak mengandung bahan yang diharamkan (darah), jika berupa daging berasal dari hewan halal yang disembeli secara tata syariat Islam.
2. Tidak mengandung khamar (alkohol dan sejenisnya).
3. Alat yang digunakan tidak boleh menggunakan peralatan yang pernah digunakan untuk benda yang haram (babi, alkohol, dll).

Sertifikasi halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan dari MUI Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang dinyatakan halal oleh LP-POM MUI.

Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).⁵² Sertifikasi halal merupakan proses kegiatan pembuatan surat keterangan halal (Fatwa Halal) atas suatu produk pangan yang dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sebagai pihak berwenang mengeluarkan fatwa di Indonesia. Maka sebagai hasilnya adalah Sertifikat Halal yang dapat dijadikan bukti bagi perusahaan untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produknya dari instansi pemerintah yang berwenang.

Pemegang sertifikat halal wajib bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produknya, dan sertifikat tersebut tidak bisa dipindah tangankan. Sertifikat yang telah habis masa berlakunya (termasuk fotocopy) tidak boleh dipergunakan untuk maksud tertentu dan wajib dikembalikan ke MUI yang menerbitkan sertifikat tersebut.

Bagi konsumen, sertifikasi halal memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal; *kedua*, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang; *ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari

⁵² KN. Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", (Vol.14 No.2, Jurnal Dinamika Hukum, 2014) hlm.230

keterpurukan akibat produk haram; *keempat*, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.⁵³

Sertifikasi juga harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong dalam bentuk “bukan kemasan” yang tidak diecerkan untuk bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang beredar dimasyarakat. Sertifikasi produk halal diberlakukan tidak hanya terhadap produk dalam negeri tetapi juga produk luar negeri. Mengenai produk yang bersertifikat halal dari sertifikat lembaga luar negeri, perlu diperhatikan bahwa tidak semua standar luar negeri atau internasional dapat diterapkan di Indonesia karena di Indonesia batasan halal adalah yang paling ketat dan tidak dapat disimpangi. Misalnya diluar negeri babi yang telah berubah menjadi X dapat menjadi tidak diharamkan lagi, sedangkan di Indonesia babi yang telah mengalami perubahan apapun tetap diharamkan.⁵⁴

Fatwa MUI tentang produk halal

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal menetapkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan produk halal diantaranya:

Pertama: Khamar

⁵³ *Ibid*, hlm. 230

⁵⁴ *Ibid*, hlm 231

1. Khamar adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.
2. Minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) minimal 1%.
3. Minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah najis.
4. Minuman yang mengandung etanol dibawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar preventif, tetapi tidak najis.
5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan etanol minimal 1% termasuk kategori khamar. Tape dan air tape tidak termasuk khamar, kecuali apabila memabukkan.

Kedua: Etanol, *Fusel Oil*, Ragi dan Cuka

1. Etanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamar adalah suci.
2. Penggunaan etanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari khamar untuk proses produksi industri pangan hukumnya.
3. Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.
4. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.
5. Penggunaan etanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamar untuk proses produksi industri hukumnya haram.
6. *Fusel oil*, yang bukan berasal dari khamar adalah halal dan suci.

7. *Fusel oil* yang berasal dari khamar adalah haram dan najis.
8. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamar adalah haram.
9. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fusel oil* yang berasal dari khamar dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci.
10. Cuka yang berasal dari khamar baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
11. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamar setelah dicuci hingga hilang rasa, bau, dan warna khamarnya hukumnya halal dan suci.

Ketiga: Pemotongan Hewan

1. Yang boleh menyembelih hewan adalah orang yang beragama Islam dan akil baliq.
2. Cara menyembelih adalah sah apabila dilakukan dengan:
 - b. Membaca “basmallah” saat menyembelih;
 - c. Menggunakan alat pemotong yang tajam;
 - d. Memotong sekaligus sampai putus saluran pernafasan/tenggorokan (*halqum*), saluran makanan (*mari'*), dan kedua urat nadi (*wadajain*); dan
 - e. Pada saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup.

3. Pada dasarnya pemingsanan hewan (*stunning*) hukumnya boleh dengan syarat: tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di-stunning statusnya masih hidup.
4. Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

Keempat: Masalah penggunaan Nama dan Bahan

1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi (*urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia, dan bakpao.
3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, *bacon flavor*, dll.

4. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan, seperti whisky, brandy, beer, dll.

Kelima: Media Pertumbuhan

1. Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal, dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram.
2. Produk mikroba yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan yang haram dan najis dalam media pertumbuhan, baik pada skala penyegaran, skala pilot plant, dan tahap produksi, hukumnya haram.
3. Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses produksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya, hukumnya haram.
4. Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba.

Keenam: Masalah Kodok

Yang menjadi pertimbangan dalam masalah kodok adalah faktor lingkungan. Nabi SAW melarang membunuh kodok. Jadi, haram membunuh dan memakan kodok.

Ketujuh: Masalah Lain-lain

1. Masalah sertifikasi halal yang kadaluarsa

- f. Untuk daging import, batasannya adalah per pengapalan (*shipment*) sepanjang tidak rusak. Untuk daging lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
- g. Untuk falvour impor dan lokal, batasannya maksimal 1 tahun.
- h. Untuk bahan-bahan lainnya baik impor maupun lokal, batasannya maksimal 6 bulan.

2. Masalah lembaga sertifikasi halal luar negeri:

Perlu ada standar akreditasi dalam hal SOP (standar operasional prosedur) dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang.

3. Masalah mencuci bekas babi/ anjing:

- a. Caranya di-sertu (dicuci dengan air 7x salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama)
- b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan nonbabi sudah melalui proses pencucian.

2. Lembaga yang Berwenang dalam Penetapan Produk Halal di Indonesia

Terdapat lembaga yang terlibat dalam persoalan halal dan haram suatu produk, yaitu Badan Pengolah Obat dan Makanan (BPOM), Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

1. Badan Pengolahan Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Latar belakang terbentuknya BPOM adalah dengan melihat kemajuan teknologi membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi tersebut produk-produk dari dalam dan luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh masyarakat. Semakin banyak produk yang ditawarkan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi produk, sementara itu pengetahuan masih belum memadai untuk memilih dan

menggunakan produk secara tepat, benar, dan aman. Di pihak lain iklan dan promosi mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan.

Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu dibentuk Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan menegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.⁵⁵

Fungsi dan wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan:

- a. Pengkajian dan Penyusunan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

⁵⁵ http://pom.go.id/profile/latar_belakang.asp. Diakses pada 29 Maret 2018, pukul 10.35 WIB

- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Diatur pula dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 69 tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu:⁵⁶

- a. Penyusunan rencana Nasional secara makro dibidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Penetapan sistem informasi dibidangnya;
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- e. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

2. LPPOM MUI

⁵⁶ Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 69.

LPPOM MUI adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan MUI untuk mengkaji produk-produk pangan, obat, dan kosmetik halal yang beredar dalam masyarakat, yaitu dengan Sertifikat Halal. Adapun tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk-produk tersebut adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya, dan juga sebagai alat promosi suatu produk.⁵⁷

Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikat halal, pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama 518 tahun 2001 dan KMA 519 tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa dan menerbitkan sertifikasi halal.⁵⁸ MUI menetapkan kehalalan produk lewat fatwa Keputusan Penetapan Kehalalan Produk.

⁵⁷ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, *Kilas Balik 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung (berkarya Untuk Umat)*, (Bandar Lampung: Lintas Kreasi, 2014), hlm.64

⁵⁸ LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia), *Tentang LPPOM MUI*, tersedia di http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/2/3/1/page/1, diakses tanggal 29 Maret 2018

3. Sistem dan Prosedur Penetapan Produk Halal

Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI.⁵⁹


Mawardi As mengatakan bahwa produk untuk mendapatkan sertifikasi halal pada produk kemasan baik berupa makanan atau minuman harus melalui LPPOM-MUI, dengan ketentuan bahwa produk tersebut telah mendapatkan izin dari BPOM terlebih dahulu. Proses auditnya dilakukan bersama-sama dengan tim auditor yang berasal dari BPOM, LPPOM MUI, dan Departemen Agama, izin pencantuman logo halal akan dikeluarkan setelah sertifikat halal diterbitkan oleh MUI dan persyaratan terpenuhi. Sementara untuk restoran, catering, atau restoran pendaftaran sertifikasi halal dapat langsung ke LPPOM MUI.⁶⁰

Syarat Pengajuan Sertifikasi Halal di LPPOM Provinsi Lampung yaitu:

1. Membayar biaya pendaftaran pengurusan sertifikat halal (biaya awal) Rp 200.000,-
2. Membuat Manual Sistem Jaminan halal (SJH) Perusahaan, dan memenuhi 11 kriteria SJH dan hal pokok lainnya, yaitu:
 - a. Informasi Dasar Perusahaan

⁵⁹ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, (Jakarta, 2008) hlm.8

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 54

- 
- b. Kendali Dokumen
 - c. Tujuan penerapan
 - d. Ruang lingkup Penerapan
 - e. Kebijakan Halal
 - f. Panduan Halal
 - g. Struktur Manajemen Halal
 - h. Standard Operating Procedures (SOP)
 - i. Acuan Teknis
 - j. Sistem Administrasi
 - k. Sistem Dokumentasi
 - l. Sosialisasi
 - m. Pelatihan
 - n. Komunikasi Internal dan Eksternal
 - o. Audit Internal
 - p. Tindakan Perbaikan
 - q. Kaji Ulang Manajemen
3. Tim AHI (Auditor Halal Internal) Perusahaan harus sudah mengikuti Pelatihan SJH (Sistem Jaminan Halal) yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI Lampung dengan biaya pelatihan sebesar Rp 500.000/peserta.
 4. Diwajibkan mengisi formulir dan data bahan baku dan produk yang ada secara rinci.

5. Lampirkan foto copy KTP pemohon/penanggung jawab/pemilik perusahaan, surat pendukung perusahaan (SIUP, SITU, Dinas Kesehatan/PIRT, dll).
6. Setelah data selesai diisi, sebelum dilaksanakan audit, harus mentransfer biaya sertifikat (sesuai Akad Biaya Sertifikasi Halal)
7. Penentuan kesepakatan audit (waktunya) disesuaikan antara Pemohon dan Tim Auditor.
8. Penjemputan Tim Auditor, tergantung kesepakatan kedua belah pihak.
9. Waktu selesai Sertifikat Halal +/-1 (satu) bulan setelah audit di lapangan
10. Bagi pelaku usaha yang memperpanjang sertifikat halal, harus mengajukan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku SH habis dan apabila sertifikat yang baru sudah selesai, diwajibkan mengembalikan sertifikat yang lama kepada kepengurusan LPPOM MUI pada saat serah terima sertifikat baru
11. Biaya surat keterangan sedang dalam proses perpanjangan, bagi perusahaan yang menginginkan, dikenakan biaya Rp 100.000,- (surat keterangan berlaku selama tiga bulan dan tidak bisa diperpanjang)

12. Masa berlaku sertifikat halal selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan, dan wajib mengajukan perpanjangan lagi, dua bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis.

Produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI dengan ketentuan sebagai berikut:⁶¹

1. Industri Pengolahan

- a. Produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan atau yang memiliki merk atau brand yang sama.
- b. Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk makloon pabrik pengemasan.
- c. Ketentuan untuk tempat makloon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal.

2. Restoran dan Katering

- a. Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun, serta menu musiman.
- b. Restoran atau katering harus mendaftarkan seluruh gerai dapur serta gudang.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 55

Bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, baik industri pengolahan, rumah potong hewan, restoran atau katering harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan. Berikut ini prosedur sertifikasi halal untuk mendapat produk halal yaitu:⁶²

1. Memahami Persyaratan Sertifikasi Halal dan Mengikuti Pelatihan SJH

Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Setelah itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan regular maupun pelatihan online.

2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan tim manajemen halal, pembuatan manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.

3. Menyiapkan Dokumen Sertifikasi Halal

Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan

⁶² Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Indonesian Halal Directory 2015-2016*, (Jakarta, 2015) hlm. 50-52

dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.

4. Melakukan Pendaftaran Sertifikasi Halal (Upload Data)

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online. Perusahaan harus membaca user manual terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.

5. Melakukan Monitoring Pre Audit dan Membayar Akad Sertifikasi

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, pembayaran biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI.

6. Pelaksanaan Audit

Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.

7. Melakukan Monitoring Pasca Audit

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.

8. Memperoleh Sertifikat Halal

Perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil dikantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun.

Sertifikat halal hanya berlaku selama 2 tahun sejak dikeluarkannya sertifikat halal. Sedangkan sistem pengawasannya sebagai berikut:⁶³

1. Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat Halal.
2. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal.
3. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM MUI.

⁶³ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 59

Setelah habis masa berlaku sertifikat halal yaitu selama 2 tahun, maka perusahaan diwajibkan memperpanjang masa sertifikatnya dengan prosedur sebagai berikut:

1. Produsen harus mendaftarkan kembali dan mengisi borang yang disediakan.
2. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
3. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagian alur proses terbaru.
4. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.
5. Perusahaan harus sudah mempunyai manual Sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal.

Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya, maka tidak akan diizinkan lagi menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI, jurnal halal.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 60

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung

Pada tahun 1971 para tokoh agama dan masyarakat Lampung mempunyai gagasan bagaimana mengumpulkan para ulama dan kyai di Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung (sebelum menjadi Kota Bandar Lampung). Langkah awal yang dilakukan pada saat itu adalah mengadakan silaturahmi dengan para ulama dan kyai untuk memikirkan umat Islam di Lampung yang masih *memprihatinkan*. Silaturahmi adalah pembuka jalan untuk menciptakan Ukhuwah Islamiyah agar makin erat dan akrab, sekaligus *ajang menyusun strategi dakwah yang efektif dan berkesinambungan*.

Situasi pasca dibubarkannya Partai Komunis Indonesia (PKI), banyak kepentingan umat Islam yang dirugikan dan banyak sekali suara sumbang yang mendiskreditkan umat Islam. Saat itu umat Islam yang mayoritas berjuang dengan caranya sendiri-sendiri dan tentu memunculkan banyak perbedaan-perbedaan yang kerap terjadi. Hal ini menjadikan posisinya lemah dihadapan pemerintah dan musuh-musuh Islam. Untuk memecahkan masalah tersebut, pertemuan dilaksanakan setiap bulan dengan tempat yang berpindah-pindah. Masalah yang dibahas saat itu mengenai hal aqidah dan ukhuwah. Sedangkan masalah khilafah tidak diperdebatkan, selama tidak menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan al-Hadits.

Masalah terpenting lainnya adalah bagaimana menciptakan persatuan dan kesatuan umat, agar *ruh al-jihad* dalam berdakwah memiliki ciri dakwah yang efektif dan berkesinambungan dapat terwujud. Agar dalam menyatukan gerak dan langkah perjuangan yang kuat dan luas, tidak hanya di Kotamadya Tanjungkarang dan Telukbetung saja, maka Forum Silaturahmi Ulama se-Kotamadya Tanjung Karang dan Telukbetung diperluas menjadi tingkat Provinsi, yang pesertanya merupakan unsur dari Muhammadiyah, NU, Persis, Tarbiyah Islamiyah dan Al Irsyad yang terdapat di berbagai daerah meliputi Lampung Tengah, Lampung Utara dan Lampung Selatan.

Setiap kali diadakan pertemuan suasana dialog dan musyawarah terasa hidup dan menumbuhkan semangat ikhlas beramal dan rela berjuang untuk memberdayakan umat Islam dalam melawan musuh-musuh Islam. Setelah beberapa kali diadakan pertemuan guna membahas masalah-masalah serta hal-hal yang tidak menguntungkan umat Islam pada saat itu, maka para ulama dan cendekiawan mengusulkan agar dibentuknya Lembaga Ulama. Dan alhamdulillah yang saat itu disponsori oleh KH Mansyur Yatim, KH Shobir, H Suwarno Ahmad (Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung) dan masih banyak yang lain, maka terbentuklah Ikatan Ulama Lampung. Karena pengurus dan anggotannya telah mewakili ulama dan kyai serta cendekiawan se-Lampung. Pada setiap pertemuan diisi tausiyah dan dialog untuk memikirkan strategi dakwah yang efektif dan praktis. Hal tersebut mendapat simpatik dan respon dari masyarakat serta peserta yang menghadiri kegiatan

pada saat itu. Walaupun baru satu tahun berjalan dan belum resmi diberi nama MUI, karena pada saat itu nama yang dipakai adalah Forum Ukhuwah Ulama, Kyai dan Cendekiawan se-Lampung, forum ini mempunyai program-program dan kegiatan sangat padat dan dapat menampung semua aspirasi masyarakat.

Walaupun organisasi keulamaan di Lampung ini baru berjalan satu tahun, tetapi organisasi ini telah mendapat undangan pada acara Musyawarah Alim Ulama (cikal bakal MUI) Pusat di Jakarta pada bulan Juli 1974. Pada acara tersebut diwakili oleh 4 (empat) orang utusan dari Lampung yaitu KH Mansyur Yatim, Drs Suwarno Ahmadi, Zakaria Nawawi dan H. Baheram Bakar.

Berdasarkan surat keputusan Musyawarah Alim Ulama Pusat Jakarta pada bulan September 1974 memberikan mandat untuk membentuk Majelis Ulama Lampung. Oleh karena itu, para Pengurus Ulama dan Cendekiawan di Lampung mengadakan pertemuan di IAIN Raden Intan di Kaliawi Tanjungkarang, yang dihadiri kurang lebih 24 orang peserta dari golongan ulama, kyai dan cendekiawan dari Tanjungkarang, Telukbetung, Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Lampung Utara. Mereka dengan rasa ukhuwah Islamiyah berdialog dan berdiskusi membicarakan strategi perjuangan Islam melalui jalur lembaga dakwah bukan partai politik. Memang pada saat membentuknya banyak tokoh Islam kala itu kecewa, karena Parpol Masyumi terpaksa harus membubarkan diri. Dialog berlangsung alot dan banyak argumentasi yang disampaikan tentang metode dan strategi berjuang,

berdakwah dan pembelaan terhadap agama, dengan tetap memperjuangkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1974, bertepatan dengan hari Jum'at 12 Zulhijjah 1394 H, para peserta rapat menetapkan dan memilih H.Suwarno Ahmadi sebagai Ketua Umum dan Drs. A. Kadir Hanafi sebagai Sekretaris Umum Majelis Ulama Lampung. Periode perkhidmatan kepengurusan MUI Provinsi Lampung pada awal periode ini adalah dari tahun 1974 s.d. 1979.

Kemudian pada tanggal 21-27 Juli 1975 mendapat undangan Munas MUI Pertama di Convention Hall Senayan Jakarta. Utusan MUI Lampung yang hadir pada acara tersebut adalah KH Zakaria Nawawi, H Baheran Bakar dan H Tarmizi Nawawi. Bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 dimana pada tanggal tersebut, dijadikan sebagai hari jadi (terbentuknya) MUI Pusat secara resmi.

Kepengurusan MUI di seluruh Provinsi di Indonesia memang sengaja dibentuk terlebih dahulu, sebelum kepengurusan MUI Pusat. Hal ini memang sengaja dilakukan agar MUI yang menjadi wadah ulama dapat mengakar dengan cepat di seluruh Indonesia. Dengan telah terbentuknya kepengurusan MUI di seluruh Provinsi, maka kebijakan-kebijakan yang dicanangkan dan ditetapkan akan dapat cepat terakomodasi ke daerah-daerah. Di samping itu, keberadaan MUI tetap kokoh dan tidak mudah untuk dilemahkan. Demikian pula keberadaan MUI di setiap kabupaten/kota pun demikian halnya. Keberadaannya berkembang menyesuaikan dengan pemekaran wilayah di

daerah masing-masing. Sehingga setiap kabupaten dan kota yang ada, kepengurusan MUI pun harus ada pula.

Adapun dalam kepengurusan awal MUI Provinsi Lampung, kepengurusan MUI Kota dan Kabupaten yang ada dalam periode awal adalah:

1. MUI Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung (sebelum menjadi Kota Bandar Lampung);
2. MUI Kabupaten Lampung Tengah;
3. MUI Kabupaten Lampung Selatan; dan
4. MUI Kabupaten Lampung Utara.

Hingga tahun 2014, mengikuti perkembangan daerah di Kabupaten/Kota di Lampung, kini MUI Kabupaten/Kota sudah ada di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung (15 Kabupaten/Kota).⁶⁵

Dewan Pimpinan MUI Provinsi Lampung sejak berdiri sampai saat ini adalah sebagai berikut :

1. Masa Khidmat 1974 – 1979

Ketua Umum : Drs. H. Suwarno Ahmadi
Sekretaris Umum : Drs. A. Kadir Hanafi

2. Masa Khidmat 1979 – 1984

Ketua Umum : KH. Mansyur Yatim
Sekretaris Umum : Drs. A. Kadir Hanafi

3. Masa Khidmat 1984 – 1989

⁶⁵ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, *Sejarah MUI Lampung*, <http://mui-lampung.or.id/2016/06/27/906/> diakses tanggal 15 April 2018 pukul 11.16

Ketua Umum : KH. Mansyur Tamin
 Sekretaris Umum : H. Nurvaif S. Chaniago

4. Masa Khidmat 1989 – 1994

Ketua Umum : Drs. H. Musa Sueb, MA
 Sekretaris Umum : H. Nurvaif S. Chaniago

5. Masa Khidmat 1994 – 2000

Ketua Umum : Drs. H. Musa Sueb, MA
 Sekretaris Umum : Prof. Dr. H. A. Fauzi Nyrdin, MS.

6. Masa Khidmat 2000 – 2005

Ketua Umum : KH. Hayatunnufus
 Sekretaris Umum : Drs. H. Basyuni Th. Kahuripan

7. Masa Khidmat 2005 – 2010

Ketua Umum : Drs. H. Mawardi AS
 Sekretaris Umum : Drs. H. Syafran Aziz, M.Ag.

8. Masa Khidmat 2010 – 2016

Ketua Umum : Drs. H. Mawardi AS
 Sekretaris Umum : Drs. H. Mansyuri Ismail

9. Masa Khidmat 2016 – 2021

Ketua Umum : Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH
 Sekretaris Umum : Drs. KH. Basyaruddin Maisir, AM

B. Visi, Misi, Tujuan dan Kewenangan (MUI) Provinsi Lampung

Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah SWT menuju

masyarakat berkualitas demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seuruh alam.⁶⁶

Misi

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islam.
2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dan berbagai aspek kehidupan.
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁷

Tujuan

MUI berikhtiar semaksimal mungkin menggerakkan segenap komponen bangsa, baik kepemimpinan maupun kelembagaan secara dinamis dan efektif sehingga mampu melaksanakan fungsinya sebagai *khadimul ummah* (pelayan

⁶⁶ *Ibid*, hlm.8

⁶⁷ *Ibid*, hlm.8-9

umat), *wasilah wa wasithah ummah* (perantara dan penengah umat) serta secara terus-menerus menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Kewenangan

Salah satu kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) , dapat menerbitkan Sertifikat Halal melalui mekanisme / SOP yang telah ditentukan.

C. Struktur Organisasi (MUI) Provinsi Lampung

Struktur Organisasi MUI Provinsi Lampung Masa Khidmat 2016-2021 :

A. DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua	: Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M. Ag
Sekretaris	: Prof. Dr. H. A.Karomani, M. Si
Sekretaris (Exs-Officio)	: Drs. KH. Basyaruddin Maisir AM
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. KH. Arif Mahya 2. KH. Nurvaif S. Chaniago 3. Drs. H. Suhaili, M.Ag 4. Drs. H. Mawardi AS 5. Prof. Dr. H.M. Damrah Khair, M.A 6. Drs. KH. Muhammad Ichwan Asron, M.A 7. Drs. H. Bas Yuni Kahuripan, M. Ag 8. Prof. Dr. Ir. H. Hasriadi Mat Akin, M.P 9. Ki. R.M. Sholeh Baijuri 10. Prof. Dr. H. Marzuki Noor, MS 11. Dr. Agus Pahrudin, M.Pd 12. Dr. H. Muhammad Khadafi, S.H., M.H 13. Dr. H. Akhrul Latief, Sm.IK.,S.H., M.H 14. Dr. Ir. M. Yusuf S.Barusman, M.B.A 15. Prof. Dr. H. MA. Achlami, M.A 16. Drs. H. Fauzi Fattah, MM 17. Drs. Aryanto Munawar 18. Ir. H. Mahfudz Santoso, MM 19. Drs. H.M. Baijuri Rasyid, M. Ag 20. KH. Wan Zakaria Jauhari 21. H. Kherlani, SE., MM

22. Fajrun Najah Ahmad
23. Drs. H. Mansyuri Ismail
24. Dr. Moh. Bahrudin, M.A.
25. Dr. Alamsyah, M.Ag
26. Drs. H. Santoso Yusuf, MM.
27. dr. H.M. Aditya, M. Biomed.
28. Dr. H. Nurdiono, SE, MM, Akt. CPA, CSRS.

B. DEWAN PIMPINAN HARIAN

Ketua Umum	: Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H.
Wakil Ketua Umum	: Drs. H. Dimyati Amin
Ketua	: H. Mahmuddin Bunyamin, Lc., M.A
Ketua	: KH. Bukhori Muslim, Lc., M.A
Ketua	: Dr. Bunyana Sholihin, M.A
Ketua	: Dr. Abdul Syukur, M.Ag
Ketua	: H. Suryani M. Nur, S.Sos., MM
Ketua	: Drs. H. Agus Saiful Islam
Ketua	: H. Imam Asyrofi AC, S.Pd.I., M.Pd.I
Ketua	: Dr. Hj. Sovia Mas Ayu, M.A
Sekretaris Umum	: Drs. KH. Basyaruddin Maisir AM
Sekretaris	: Dr. Safari Daud, S.Ag., M.Ag
Sekretaris	: Muhammad Faizin, S.Pd.
Sekretaris	: Drs. Mansyur Hidayat, M.Ag
Sekretaris	: Drs. H. Heri Sensustadi
Bendahara Umum	: H. Muhammad Supriyadi, S.Pd.
Bendahara	: Arifin Gunawan, SE
Bendahara	: H. Narso, S.Sos., M.Si

C. PENGURUS KOMISI-KOMISI :

1. Komisi Fatwa

- | | |
|------------|--|
| Ketua | : K.H. Munawir |
| Sekretaris | : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I |
| Anggota | : 1. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. |
| | 2. Dr. H. Abdul Malik Ghazali, M.A. |
| | 3. Dr. K.H. Moh. Zainul Abidin, S.Ag., S.H., M.Ag. |
| | 4. K.H. Abdul Basith, S.Pd.I., M. Pd.I |
| | 5. H. Rohmat, S. Ag., M.H.I |

6. Ahmad Rifa'i, M.Pd.I

2. Komisi Ukhuwah Islamiyah

Ketua : Dr. H. Damanhuri Fatah, M.M
 Sekretaris : Drs. Nur Islam, M.I.P
 Anggota : 1. Dr. H. Yusuf Baihaki, M.A
 2. Drs. H.A. Shodri Daram, M.E
 3. Drs. K.H. A. Aunullah Firdaus, M.M
 4. H. Ahmad Mufti Salim, Lc., M.A.
 5. Drs. H.M. Masdar, MS, M.M.
 6. H. Rahmat Hidayat Habibullah, S.Pd.I
 7. H. Endri Saprijal, S.Ag., M.H.

3. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat

Ketua : Drs. K.H. Muhammad Rusfi, M.Ag
 Sekretaris : Dr. H. Rosidi, M.A.
 Anggota : 1. H. Suparman Abdul Karim Hasan
 2. Suratno, S.Pd.I
 3. K.H. Muhammad Rais RS
 4. K.H. M. Radja'i
 5. Edy Muslimin, S.Sos.I
 6. Agus Kusworo MS, S.H., M.H
 7. Rodi Nikmat, S.Sos.I., M.Kom.I

4. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi

Ketua : Dr. H. Arpandi Ismail, M.A
 Sekretaris : Drs. Amiruddin, M.Ag.
 Anggota : 1. Drs. H. Jamaluddin, M.M
 2. Drs. H. Aswari Sholeh
 3. Drs. H. Khoirul Abror, M.H.
 4. Drs. H. Said Jamhari, M.Kom.I.
 5. Dr. Jayusman, M.Ag.
 6. H. Chairul Anwar Sattar, S.E
 7. Drs. H. Ujang Hafid

5. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Ketua : Dr. H. Fauzi, S.E., M.Kom., Akt.
 Sekretaris : Nurdin Hasboena, S.E.
 Anggota : 1. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt.
 2. Dr. Marselina Djayasinga, S.E., M.P.M.
 3. Nelly Aida, S.E., M.Si.
 4. Ridwansyah, S.E., M.E.Sy.
 5. Evi Ekawati, S.E., M.Si.
 6. Rodho Intan Putri Hasibuan
 7. Ahmad Mustafa, M.M

6. Komisi Informasi dan Komunikasi

Ketua : Dr. Ahmad Isnaini, M.A.
 Sekretaris : Maskut Candranegara
 Anggota : 1. Bainalhuri Halim, S.Sos., M.Kom.I
 2. Al-Huda Muhajirin
 3. Nurachman
 4. Abdul Qodir Zaeilani, S.H.I., M.A
 5. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I
 6. Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I

7. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga, dan Remaja

Ketua : Dra. Hj. Tatik Rahayu Ningsih, M.Sos.I
 Sekretaris : Dra. Siti Masykuroh, M.Sos.I
 Anggota : 1. Dr. Siti Mahmudah, M.Ag.
 2. Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag.
 3. Dra. Romlah, M.Pd.I
 4. Hj. Afifah Marno, S.Sos
 5. Dra. Hj. Komarul Kuniati, M.Kom.I
 6. Dra. Hj. Ratnasari Paksi

8. Komisi Hukum dan Perundang-Undangan

Ketua : Rudy, S.H., LL.M., LL.D
 Sekretaris : Dr. Drs. K.H. Wagianto, S.H., M.H.
 Anggota : 1. Yudi Yusnandi, S.H., M.H
 2. Kusairi Suwandi, S.H.I., SH., M.H.I

3. Dr. Eva Rodian Nur, M.H
4. Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H
5. Marwin, S.H., M.H.
6. Drs. H. Achmad Moelyono, M.H..
7. Hayatul Qodri, S.H.I.

9. Komisi Pengkajian dan Penelitian

- Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A
 Sekretaris : Dr. Sidi Ritaudin, M.Ag
 Anggota : 1. Dr. Sudarman, M.Ag.
 2. H. Maulana Mukhlis, M.I.P.
 3. Damanhuri, M.Pd.
 4. Iwan Sastrawan, S.H., M.H.
 5. Iskandar Muda, S.H., M.H.
 6. Drs. M. Sholeh, M.A.

10. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama

- Ketua : Dr. Idrus Ruslan, M.Ag.
 Sekretaris : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I
 Anggota : 1. H. Wasril Purnawan, M. Si
 2. Drs. H. Lemra Horizon, M.Pd.I.
 3. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M..H.
 4. Drs. H. Maswi
 5. Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.
 6. Akhiruddin Habe, S.E., M.M.
 7. Ade Wawan, S.S., M.Pd.I.

11. Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam

- Ketua : Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag.
 Sekretaris : Rudi Irawan, S.Pd.I., M.Si.
 Anggota : 1. Dadang Rukhiyat
 2. Dra. Hj. Fadilah Umar, M.Pd.I.
 3. Tajuddin Nur, S.Sos.I.
 4. Ahmad Muhit Ridwan Aly
 5. H. Taufik Rahman, S.Ag.
 6. Suhandi, S. Ag., M.Kom.I.

7. Khairuddin, S.Pd.I
8. Nazarudin, S.H.

12. Komisi Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

- Ketua : Dr. H. Achmad Farich
 Sekreataris : Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.
 Anggota : 1. Tubagus Nasaruddin, S.H., M.H.
 2. Dr. Hj. Erina Pane, SH., M.Hum.
 3. Ir. Hj. Agustini, M.M.
 4. drh. Sunandjak Agung Wiwoho
 5. Karno Ahmad Sutarya, S.Sos.I.
 6. Taufik Amir, S.Sos.I
 7. Andi Danata, S.P. M.Sc.
 8. Usman Affandi

13. Komisi Kerjasama dan Hubungan Internasional

- Ketua : Dr. K.H. Bukhori Abdul Shomad, M.A.
 Sekreataris : Drs. H. Munzir Ahmad Syukri, M.M.
 Anggota : 1. Dr. Bambang Budi Winarto, M.Ag.
 2. H. Ikhwan Fikri, Lc., LL.M.
 3. Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy.
 4. H. Deska Masriyanto, Lc.
 5. Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I.
 6. Yesi Velina, M.Si.

Dalam 13 komisi ini yang menjadi bagian dalam menangani perihal label makanan dan minuman halal adalah Komisi Fatwa, bersama-sama dengan Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia.⁶⁸

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Suryani, S.Sos., M.M, Ketua V MUI Provinsi Lampung, tanggal 30 Mei 2018

D. Produk Bir Non Alkohol Menurut MUI Provinsi Lampung

Minuman alkohol adalah produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi dengan menggunakan ragi, pada bahan yang mengandung pati atau gula tinggi.⁶⁹ Minuman yang merupakan hasil fermentasi yang menghasilkan minuman beralkohol adalah haram untuk dikonsumsi.

Merujuk kepada fatwa MUI. No 4 tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal, bagian ke satu “Khamr”, menyatakan bahwa:⁷⁰

1. Khamar adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.
2. Minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) minimal 1%.
3. Minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah najis.
4. Minuman yang mengandung etanol dibawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar preventif, tetapi tidak najis.
5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan etanol minimal 1% termasuk kategori khamar.
6. Tape dan air tape tidak termasuk khamar, kecuali memabukkan.

Menurut MUI pembuatan bir non-alkohol sama dengan proses pembuatan bir biasa, hanya saja diakhir proses alkoholnya dihilangkan, ini adalah proses pembuatan produk Green Sand Zero. Hukum keharaman mengacu pada Fatwa MUI No. 4 tahun

⁶⁹ Muslim Daily, *Wawasan Islam*, <http://www.muslimdaily.net/khazanah-islam/wawasan-islam/meskipun-0-alkohol-bintang-zero-tetaplah-minuman-haram.html> diakses tanggal 23 Mei 2018

⁷⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 4 Tahun 2003, *Standarisasi Fatwa Halal*, hlm.657

2003 pada produk Bintang Zero cara pembuatannya tidak melewati proses fermentasi, tetapi produk ini diciptakan rasanya seperti bir. Proses pengimitasian terhadap barang haram sehingga akan mengajarkan konsumen muslim untuk menyukai sesuatu yang haram maka hukumnya pun tetap haram. Maksud dari Non-Alcoholic Beer (NAB) atau bir tanpa alkohol dalam kamus Alcohol Beverages ialah minuman bir yang masih boleh mengandung alkohol hingga 0,5%.⁷¹ Dengan bertambahnya pengetahuan kita mengenai keharaman bir non-alkohol maka kita pun dapat terhindar dari meminum minuman yang haram menurut ajaran Islam.⁷²

E. Pendapat MUI Provinsi Lampung tentang Produk Bir Non Alkohol yang belum Disertifikasi halal

Bir menurut MUI adalah minuman yang beralkohol, minuman bir meskipun 0% alkohol tidak memiliki sertifikat halal MUI, dan tidak memenuhi syarat untuk diajukan permohonan sertifikasinya ke MUI, mengingat nama dan kandungan bahannya tidak sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan.⁷³

Dalam penanganan sertifikasi halal MUI sangat berperan penting terhadap suatu produk makanan dan minuman, tanpa label halal dari MUI dikatakan bahwa masih belum jelas kehalalannya terlebih lagi masyarakat

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Suryani, S.Sos., M.M, Ketua V MUI Provinsi Lampung, tanggal 30 Mei 2018

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

Indonesia banyak dari kalangan muslim, maka dari itu sangat penting sekali label halal pada suatu produk.

Wewenang MUI salah satunya adalah memberikan sertifikasi halal melalui mekanisme/SOP yang diberikan. Fatwa MUI tentang produk halal yaitu berdasarkan Fatwa MUI No. 4 tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal menetapkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan produk halal diantaranya:⁷⁴

Keempat : penggunaan nama dan bahan

1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan;
2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi (urf') dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakpao, dan bakpia.
3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavor, dll;
4. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.

⁷⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 4 Tahun 2003, *Standarisasi Fatwa Halal*, hlm.133

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwasanya Sertifikat Halal tidak akan dikeluarkan bagi produk makanan-minuman yang memiliki nama atau berkonotasi pada sesuatu yang haram, walaupun kenyataannya bahan yang digunakan produk tersebut seluruhnya halal. Sertifikat halal hanya akan dikeluarkan apabila nama produknya telah diganti.⁷⁵



⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Suryani, S.Sos., M.M, Ketua V MUI Provinsi Lampung, tanggal 30 Mei 2018

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Pendapat MUI Provinsi Lampung tentang Produk Bir Non Alkohol

Label halal merupakan label yang menginformasikan tentang konstruksi atau pembuatan suatu produk, ingredient atau bahan baku, dan efek yang ditimbulkan yang sesuai dengan standar halal, yakni tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁷⁶

Penentuan kehalalan atau keharaman dalam Islam adalah sesuatu yang tidak dapat didasarkan hanya dengan asumsi semata. Halal atau haram harus diputuskan melalui suatu pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai persoalan agama dan persoalan yang ditentukan hukumnya.⁷⁷

Secara teknis, produk-produk makanan dan minuman olahan dihasilkan melalui proses dimana tidak diketahui secara jelas apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut suci dan halal dan apakah proses pengolahannya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Terlebih lagi produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas non muslim, sekalipun bahan

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Suryani, S.Sos., M.M, Ketua V MUI Provinsi Lampung, tanggal 19 Mei 2018

⁷⁷ Muhammad Kholiq, *Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, hlm 78.

bakunya berupa barang suci dan halal tetapi tidak menutup kemungkinan dalam proses pengolahannya tercampur bahan-bahan haram atau najis. Ketidakjelasan ini menyebabkan status hukum dari produk olahan tersebut menjadi samar (tidak jelas halal-haramnya).⁷⁸

Menurut MUI Provinsi Lampung Produk Bir Non Alkohol itu tetap haram hukumnya, karena :

1. Karena proses pembuatan bir non-alkohol ini sama dengan proses pembuatan bir biasa, hanya saja diakhir proses alkoholnya dihilangkan. Maka hukumnya pun tetap haram untuk dikonsumsi walaupun bir tersebut kandungan alkoholnya 0%. Maka dari itu segala sesuatu produk yang masih berkaitan dengan khamr baik nama dan kandungannya tetap tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi.
2. Mudharat yang didapat dari mengonsumsi bir non alkohol ini adalah dalam segi kesehatan kebiasaan meminum-minuman keras akan berdampak negatif peminum biasanya menampilkan ciri fisik yang berbeda dari orang biasanya, perut bagian bawah (sisikan) mereka terlihat buncit sedangkan tubuh mereka sendiri kurus dan juga akan berdampak pada tubuh yang akan terancam masalah dari dalam tubuh seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Efek jangka pendeknya seperti

⁷⁸ Badriyatus Sholihah, *Produk Makanan Kemasan Tanpa Label Halal Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Sarjanan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung 2016, hlm.68

mengantuk, pusing, ketidakmampuan untuk berfikir jernih. Dalam segi sosial kebiasaan meminum-minuman ini banyak menimbulkan masalah diantaranya dapat memutuskan orang untuk mengerjakan sholat, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Sedangkan dalam jiwa, yaitu dapat menghalang-halangi untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agama diantaranya sholat. Produk yang belum jelas kehalalannya wajib dihindari sampai ada kejelasan halalanya, karena status jaminan perlindungan halal adalah hak bagi konsumen muslim dan setiap konsumen muslim hanya boleh mengkonsumsi produk halal.

Maka untuk memberikan jaminan atas kehalalan produk yang dihasilkan untuk dikonsumsi masyarakat muslim, produsen agar segera mensertifikasi halal produknya. Karena dalam Islam juga sudah ditentukan agar makan dan minum yang sudah jelas kehalalannya seperti pada surah Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya : *dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*

Dalam ayat diatas Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan dan minum yang halal. Yang berarti segala sesuatu yang dimakan atau minum

harus jelas kehalalannya. Maka dari itu dengan adanya label halal ini membuat konsumen menjadi tidak ada keraguan untuk memilih makanan dan minuman. Karena halal dan haram adalah perkara yang jelas seperti pada hadits HR.Muslim:

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالحَرَامُ بَيْنَ وَ بَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ التَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَ عِرْضِهِ (رواه مسلم)

Artinya : “*halal dan haram adalah perkara yang jelas, dan diantara keduanya terdapat perkara yang syubhat (sesuatu yang meragukan, samar-samar, sesuatu yang tidak jelas apakah halal atau haram), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya*”.(HR. Muslim)

Menurut MUI segala sesuatu produk yang berkaitan dengan khamar baik kandungannya maupun namanya tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Hal ini juga dibenarkan didalam Alqur'an surah Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Untuk kriteria produk-produk minuman yang berkaitan dengan bir ini tidak ada kriteria khusus untuk menentukan suatu label halal ini. Maka dari itu segala sesuatu produk yang masih berkaitan dengan khamr baik nama dan kandungannya tetap tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi.

B. Analisis Pendapat MUI Provinsi Lampung tentang Produk Bir Non Alkohol yang belum Disertifikasi Halal

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan. Diatur dalam pasal 10 ayat 1 yang isinya setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut “halal” bagi umat manusia, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan pada label halal. Ketentuan halal di Indonesia telah diwujudkan pemerintah melalui peran MUI yang memiliki

wewenang dalam menangani masalah halal yang berkaitan dengan pangan, obat-obatan, dan juga kosmetika. Label halal yang tercantum pada kemasan menandakan bahwa makanan dan minuman tersebut telah dijamin kehalalannya oleh LPPOM-MUI untuk dikonsumsi masyarakat sebagaimana sesuai dengan ketentuan halal dalam Islam. Selain itu juga dengan adanya label halal pada setiap kemasan, masyarakat khususnya bagi umat muslim menjadi lebih aman dan nyaman untuk mengonsumsi bermacam-macam makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika.

Label halal sangat penting bagi konsumen sebagai bentuk perlindungan atas konsumen yang mayoritas muslim, karena Islam memandang sebuah perlindungan konsumen bukan hanya sebagai hubungan keperdataan melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas (hubungan horizontal), bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT (hubungan vertikal). Dalam Islam, melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban sebuah negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan secara fokus dan serius.

Mengapa sangat penting, karena konsumen Indonesia mayoritas merupakan konsumen beragama Islam yang sudah selainnya mendapatkan perlindungan atas segala jenis produk barang dan jasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Oleh karenanya konsumen muslim harus mendapatkan perlindungan atas kualitas mutu barang dan jasa serta tingkat kehalalan suatu barang dan jasa yang ditawarkan

oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen juga merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya atas produk yang halal dan baik. Dengan produk halal/label halal dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen dan pasarnya bisa menjangkau semua kalangan, baik muslim maupun non muslim.⁷⁹

Meskipun demikian tidak semua produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat halal dan mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Kenyataan yang terjadi dilapangan saat ini masih terdapat produk kemasan minuman yang tidak memiliki label halal dijual bebas di minimarket maupun supermarket, diantaranya bintang zero, guinness zero, green sands yang semuanya mencantumkan mengandung nol persen alkohol. Permasalahan ini menimbulkan suatu keraguan dalam masyarakat apakah produk-produk tersebut halal atau tidak untuk dikonsumsi, karena produk-produk tersebut tidak ada yang menjamin kehalalannya.

Pihak MUI Provinsi Lampung menyatakan bahwa produk-produk bir non alkohol tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan permohonan sertifikasi ke MUI, mengingat nama dan kandungan bahannya tidak sesuai dengan standar halal yang ditetapkan. Sertifikat halal akan dikeluarkan apabila nama produk-produknya telah diganti. Seperti yang dikeluarkan Fatwa MUI No. 4 tahun 2003 tentang

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Suryani, S.Sos., M.M, Ketua V MUI Provinsi Lampung, tanggal 19 Mei 2018

Standarisasi Fatwa Halal bagian ke empat “Penggunaan Nama dan Bahan “ yang menyatakan bahwa:

1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan;
2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi (urf’) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakpao, dan bakpia.
3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavor, dll;
4. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.

Pihak MUI telah menentukan Standarisasi Fatwa Halal tentang Penggunaan Nama dan Bahan, maka dari itu produk ini tidak mendapatkan label halal karena menggunakan nama minuman yang diharamkan. Sebagaimana pendapat Bapak Suryani Ketua V MUI Provinsi Lampung, bahwa

produk bir non alkohol menurut proses pembuatan bir non-alkohol sama dengan proses pembuatan bir biasa, hanya saja diakhir proses alkoholnya dihilangkan. Maka hukumnya pun tetap haram. Lalu dalam segi nama dan bahan MUI telah mengeluarkan fatwa bahwasannya nama yang digunakan dalam produk ini menggunakan nama yang diharamkan.

Menurut MUI segala sesuatu produk yang berkaitan dengan khamar baik kandungannya maupun namanya tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Hal ini juga dibenarkan didalam Alqur'an surah Al-Maidah ayat 90-91:



يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاحْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

MUI menyatakan bahwasannya Sertifikat Halal tidak akan dikeluarkan bagi produk makanan-minuman yang memiliki nama dan berkontaminasi pada sesuatu yang haram, walaupun kenyataannya bahan yang digunakan produk tersebut seluruhnya halal. Sertifikat Halal hanya dikeluarkan apabila nama produknya telah diganti.



BAB V

PENUTUP

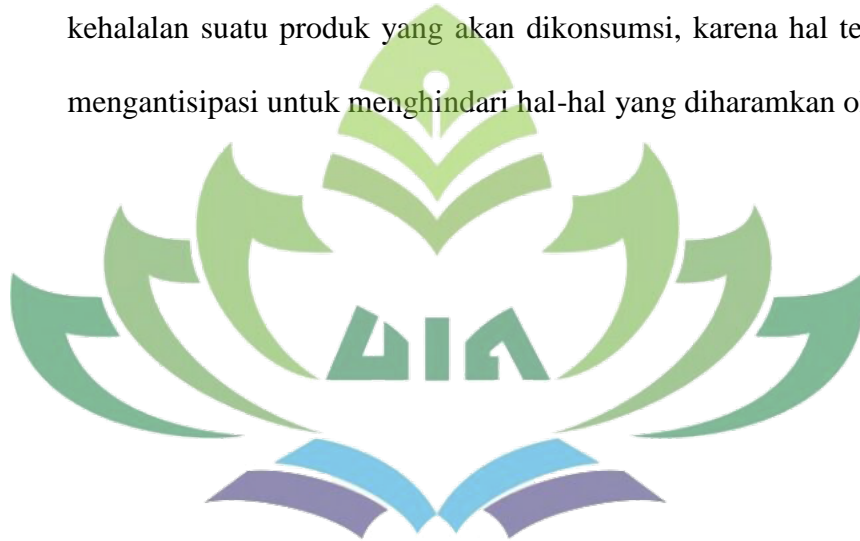
A. Kesimpulan

Pembahasan tentang Produk Bir Non Alkohol Tanpa Label Halal dalam Perspektif MUI Provinsi Lampung, telah diuraikan di atas dalam skripsi ini. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Produk bir non alkohol itu tetap haram hukumnya, karena proses pembuatan bir non alkohol sama saja seperti pembuatan bir biasa hanya saja diakhir proses alkohol tersebut dihilangkan. Dan belum ada produk bir yang mendapatkan label halal. Disamping itu lebih banyak mudharatnya seperti: radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Efek jangka pendeknya seperti mengantuk, pusing, ketidakmampuan untuk berfikir jernih. Dalam segi sosial kebiasaan meminum-minuman ini banyak menimbulkan masalah diantaranya dapat memutuskan orang untuk mengerjakan sholat, menimbulkan permusuhan dan kebencian.
2. Sesuai Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwasannya Sertifikat Halal tidak akan dikeluarkan bagi produk makanan-minuman yang memiliki nama dan berkontaminasi pada sesuatu yang haram, walaupun kenyataannya bahan yang digunakan produk tersebut seluruhnya halal. Sertifikat Halal hanya dikeluarkan apabila nama produknya telah diganti.

B. Saran

1. Peran pemerintah dan instansi setempat sangat dibutuhkan guna pengawasan beredarnya produk makanan dan minuman tanpa izin BPOM maupun sertifikasi halal dari LPPOM-MUI yang kemungkinan berbahaya untuk dikonsumsi masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang menyimpang.
2. Para konsumen khususnya konsumen muslim harus lebih teliti mengenai kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi, karena hal tersebut untuk mengantisipasi untuk menghindari hal-hal yang diharamkan oleh agama.



DAFTAR PUSTAKA

- Sari', Abu Muhammad Abdul Hadi, *Al-Ath'imah Wadz Dzabaa-ih* terj. Sofyan *Hukum Makanan dan Sembelihan Dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1997.
- Bisri, Adib dan Munawwir AF, *Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Ahsin W. Al-Hafdz, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2007.
- Aziz, Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, cet-1, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mudhafier, Fadhlán dan Wibisono, *Makanan Halal (Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha)*, Jakarta: Zakia Press, 2004.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Hamka, *Tafsir AlAzhar*, Jakarta: PT.Pustaka Panjimas, 1984.
- Tahido, Huzaimah Yanggo, *Masail Fiqiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Percetakan Angkasa, 2005.
- Imam Al Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Surabaya, Putra Pelajar, 2002

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 1

J. Lexi Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.

Willey, John dan Soon, *Introduction To Organic Chemistry*, ttp: t.p, 2011.

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Irianto, Koes, *Pencegahan dan Penanggulangan Keracunan Bahan Kimia Berbahaya*, M.

Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an Jilid 2*, Tangerang: Lentera Hati, 2006

Bandung: Yrama Widya, 2013.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Indonesan Halal Directory 2015-2016*, Jakarta, 2015.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, Jakarta, 2008.

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, *Kilas Balik 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung (berkarya Untuk Umat)*, Bandar Lampung: Lintas Kreasi, 2014.

Malik, Abu Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Umat, 2007.

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Nasib, Muhammad Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 2012.

Quraish, M. Shihab, *Membumikan Al Qur'an Jilid 2*, Tangerang: Lentera Hati, 2006.

Qutbh, Sayyid, *Tafsir Fi Dzilalill Qur'an*, Jilid 3,

AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Ahmad, Syaikh Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Darus Sunnah, 2014.

Unaradjan Dulet, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: PT Grapindo, 2000.

Abu, Yazid Fida', *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, Solo: Pustaka Arafah, 2004.

Qardhawi, Yusuf, *Al-Halal wal-haram fil-Islam* terj. Abu Sa'id al-Falahi, *Halal dan Haram*, Jakarta: Robbani Press, 2008.

Daftar Referensi Lainnya:

Badriyatus Sholihah, *Produk Makanan Kemasan Tanpa Label Halal Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung 2016

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 4 Tahun 2003, *Standarisasi Fatwa Halal*

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 69.

Kiblat, *Hukum Alkohol dalam Makanan dan Minuman*. <https://m.kiblat.net/2014/03/27/hukum-alkohol-dalam-makanan-dan-minuman/> diakses pada tanggal 30 Mei 2018

KN. Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", (Vol.14 No.2, Jurnal Dinamika Hukum, 2014)

LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia), *Tentang LPPOM MUI*, tersedia di http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/2/3/1/page/1, diakses tanggal 29 Maret 2018

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, *Sejarah MUI Lampung*, <http://mui-lampung.or.id/2016/06/27/906/> diakses tanggal 15 April 2018

Muhammad Kholiq, *Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang

Muslim Daily, *Wawasan Islam*, <http://www.muslimdaily.net/khazanah-islam/wawasan-islam/meskipun-0-alkohol-bintang-zero-tetaplah-minuman-haram.html> diakses tanggal 23 Mei 2018

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 69 tahun 1999, *Label dan Iklan Pangan*.

Wawancara dengan Bapak Suryani, S.Sos., M.M, Ketua V MUI Provinsi Lampung, tanggal 19 Mei 2018

